



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS TENAGA KERJA
JL. PEMUDA NO. 55A MOJOSARI, MOJOKERTO 61382 JAWA TIMUR
TELP. (0321) 592192 FAX. (0321) 593581

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO**

NOMOR 188.45/ 30 /KEP/416-107/2025

TENTANG

**RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Maka setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2026.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2026
- KEDUA** : Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara berkesinambungan dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- BAB III : Tujuan dan sasaran
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V : Penutup
- LAMPIRAN
- KETIGA** : Uraian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 11 Agustus 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 30 /KEP/416-107/2025
TANGGAL Agustus 2025

MATRIKS RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET		LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME					SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR													
2.07	KETENAGAKERJAAN													
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50 (A)	NILAI		5.587.434.000					
					Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1	Inovasi							
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target		100	%		-					
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	Dokumen		-					
	RINCIAN :													
	Dokumen Rencana Kerja APBD					1	Dokumen		-					
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD					1	Dokumen		-					
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6	Laporan		-					
	RINCIAN :													
	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan					4	Dokumen		-					
	Penyusunan Dokumen LKjIP					1	Dokumen		-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET		LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME					SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
	Penyusunan Dokumen SAKIP					1	Dokumen		-					
2.07.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	Berita Acara		-					
	RINCIAN :													
	Forum konsultasi publik tingkat OPD					0	Berita Acara		-					
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90,81	%		5.171.822.600					
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33	Org/ bln		5.167.822.600					
	RINCIAN :													
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN					33	Org/ bln		2.487.305.000					
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)					33	Org/ bln		2.229.500.000					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN					33	Org/ bln		92.868.000					
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan					5527	Org/ bln (12 bln)		358.149.600					
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	Dokumen		4.000.000					
	RINCIAN :													
	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1	Dokumen		4.000.000					
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja		86,16	Nilai		-					
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	Paket		-					
	RINCIAN :													
	Pakaian Dinas harian (Keky/Batik/Hitam Putih/Olahraga)					0	Paket		-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET		LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME					SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100	%		132.181.400					
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan		8	Paket		54.000.000					
	RINCIAN :													
	Belanja Modal peralatan, perlengkapan kebutuhan kantor					8	Paket		54.000.000					
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan		6	Paket		8.600.000					
	RINCIAN :													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6	Paket		8.600.000					
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan		11	Paket		19.621.400					
	RINCIAN :													
	Cetakan Kop Dinas Map/Amplop/Banner/Cetak Buku/Kartu Kendali/Lembar Disposisi/Iklan/Langgan Koran /Foto copy/Jilid Buku					11	Paket		19.621.400					
2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		2	Paket		16.960.000					
	RINCIAN :													
	ATK/Kertas Cover/Bahan Komputer/Benda Pos					2	Paket		16.960.000					
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		82	Laporan		33.000.000					
	RINCIAN :													
	Belanja Perjalanan dinas dalam kota/ Biasa/Luar Provinsi					82	Laporan		33.000.000					

[illegible]

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET		LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME					SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
	Pemeliharaan AC/CCTV/Personal Komputer/ Peralatan Personal Komputer/Pompa Air					25	Unit		22.430.000					
2.07.02	Program perencanaan tenaga kerja				Persentase Program Dan Kegiatan Yang Mengacu Perencanaan Tenaga Kerja	100	%		-					
2.07.02.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun		0	Dokumen		-					
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		0	Dokumen		-					
	RINCIAN :													
	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro					0	Dokumen		-					
2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja				Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi	92,5	%		494.000.000					
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi		48	Orang		490.000.000					
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		48	Orang		450.000.000					
	RINCIAN :													
	Pelatihan Digital Marketing					0	Orang		-					
	Pelatihan Operator Alat Berat (Forklift)					16	Orang		150.000.000					
	DBHCHT													
	Pelatihan dan sertifikasi pembuatan kue					16	Orang		150.000.000					
	Pelatihan dan sertifikasi tata rias					16	Orang		150.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET		LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME					SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina		15	Lembaga		4.000.000					
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		15	Lembaga		4.000.000					
	RINCIAN :													
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					15	Orang		4.000.000					
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri					0	Orang		-					
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas		0	Perusahaan		-					
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas		0	Perusahaan		-					
	RINCIAN :													
	Fasilitasi konsultasi produktivitas					0	Perusahaan		-					
2.07.04	Program penempatan tenaga kerja				Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun n	16,5	%		104.000.000					
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Fasilitasi Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target		100	%		13.000.000					
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		0	Orang		-					
	RINCIAN :													
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		20	Orang		13.000.000					

[illegible]

[illegible]

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET		LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME					SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
3.32.03	Program pembangunan kawasan transmigrasi				Persentase calon transmigran yang ditempatkan	100	%		65.000.000					
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Persentase kegiatan fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai target		100	%		65.000.000					
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1	Laporan		22.500.000					
	RINCIAN :													
	Fasilitasi koordinasi Daerah penerima trans					1	Laporan		22.500.000					
3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		1	Kepala Keluarga		17.500.000					
	RINCIAN :													
	Fasilitasi penempatan Calon Transmigran Kabupaten Mojokerto					1	Kepala Keluarga		17.500.000					
3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan		15	Kepala Keluarga		5.000.000					
	RINCIAN :													
	Fasilitasi penyuluhan Calon Transmigran Kabupaten Mojokerto					15	Kepala Keluarga		5.000.000					
3.32.03.2.01.0019	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)			Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran		2	Paket		20.000.000					
	RINCIAN :													
	Fasilitasi bantuan bagi Calon Transmigran Kab. Mojokerto					2	Paket		20.000.000					
3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi		0	Lokasi		-					
	RINCIAN :													
	Monitoring dan evaluasi transmigran Kabupaten					0	Lokasi		-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Mojokerto di lokasi penempatan trans												
JUMLAH								9.485.351.000					

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2026



DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana kerja organisasi perangkat daerah OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto merupakan acuan perencanaan kegiatan selama satu tahun. Adapun penyusunan Rencana Kerja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan aturan secara rinci berpedoman dari Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dan nantinya akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, dimana pada pelaksanaannya nanti terdapat 5 (Lima) program yang terdiri dari 4 (empat) Program Prioritas, 1 (satu) program pilihan dan 1 (satu) program pendukung.

Harapan kami semoga Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif Tahun 2026.

Mojokerto, 11 Agustus 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680207 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 LATAR BELAKANG 1

 1.2 LANDASAN HUKUM..... 3

 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6

 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 7

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
..... 9

 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
 RENSTRA OPD 9

 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 17

 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
 PERANGKAT DAERAH 19

 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD 20

 2.5 PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 37

 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 37

 3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 38

 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 57

BAB V PENUTUP..... 71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 3 yaitu *“Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah”*, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan untuk menyusun rancangan rencana kerja OPD (sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan rancangan rencana kerja OPD ini mengacu pada Draft [Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah \(RPJMD\) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dan Draft Rencana Strategis \(RENSTRA\) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029](#) serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rencana Kerja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

Berdasar Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto membuat rencana kerja yang merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara terukur. Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, maka dalam penyusunannya memerlukan data dan informasi yang akurat sebagai bahan

dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan. Selain itu rencana kerja ini menjabarkan visi dan misi kepala daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dalam Pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan yang efektif, efisien dan akuntabel maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, faktual dan realistis.

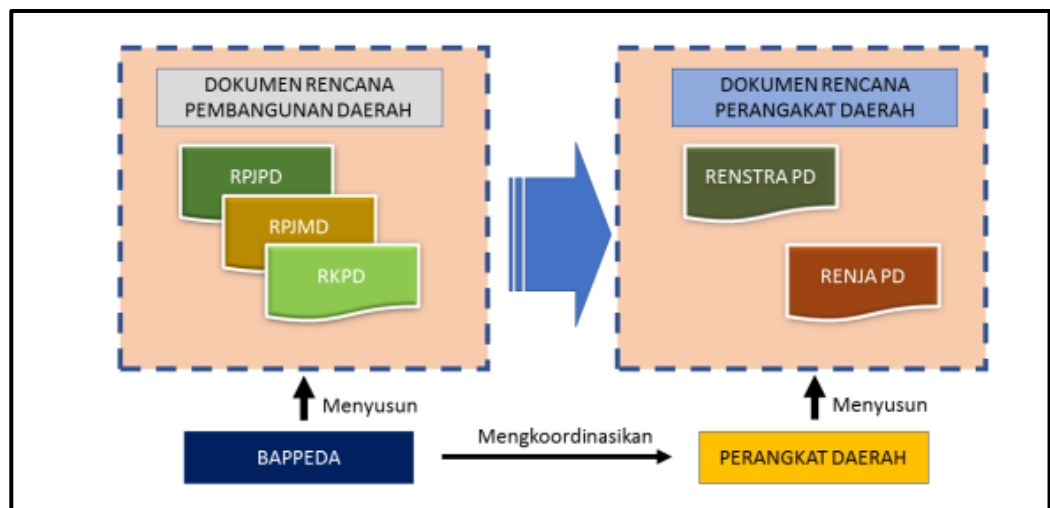
Bahwa dalam merumuskan tujuan yang jelas, faktual dan realistis perlu diketahui dan diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto yang dikaitkan dengan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kebijakan di daerah Provinsi. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi antara Visi dan Misi Para Pemangku kewenangan di Pusat dan daerah yang meliputi antara lain :

Tabel 1
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN), PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2030

NO	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN		PEMERINTAH DAERAH PROV. JAWA TIMUR		PEMERINTAH KAB. MOJOKERTO	
	VISI	SASARAN STRATEGIS	VISI	SASARAN STRATEGIS PD	VISI	SASARAN STRATEGIS PD
	Terwujudnya ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, produktif, dan berkeadilan menuju Indonesia emas 2045	1. Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan; 2. Meningkatnya tata kelola dan pelayanan publik Kementerian Ketenagakerjaan yang profesional dan berintegritas	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong	1. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor Ketenagakerjaan; 2. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam rangka hubungan industrial yang kondusif dan perlindungan tenaga kerja; 3. Meningkatnya taraf ekonomi transmigran.	Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur	1. Meningkatnya penempatan tenaga kerja; 2. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis dinamis dan kondusif

Perumusan kebijakan tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, dengan mengacu pada RKPD tersebut maka diharapkan dokumen Rencana Kerja OPD yang tersusun terjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dapat berhasil dan tepat sasaran melalui konsistensi pemahaman antar dokumen baik ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Diagram 1
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
29. Draft Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)
33. Draft Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto:

a. Maksud:

1. menentukan sasaran indikator dan penetapan kinerja dalam bentuk penyusunan program kegiatan;
2. menentukan lokasi kegiatan dan menyusun indikator kinerja kegiatan;

3. serta menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang, sehingga mampu menjawab tuntutan agar pembangunan di bidang ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten Mojokerto lebih efektif, efisien, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Tujuan:
- Tujuan disusunnya rancangan rencana kerja adalah sebagai perwujudan dokumen perumusan, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan pada tahun N+1 sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan rancangan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang rancangan rencana kerja perangkat daerah, proses penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah, Keterkaitan antara RENJA PD dengan dokumen RKPD, RENSTRA PD, RENJA K/L dan RENJA PROVINSI, Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan rancangan rencana kerja perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, Analisis Kinerja Pelayanan OPD dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan uraian tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto pada Renja tahun lalu dan pencapaian target Renstra OPD bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Dokumen Renstra OPD. Rincian pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 meliputi kinerja dan anggaran per program adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan, untuk pencapaian kinerja dengan 2 indikator program yaitu nilai sakin perangkat daerah yaitu 81,30 dan target yang dicanangkan 83,50 capaiannya sebesar 97,37%. Dan indikator kedua adalah jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target 2 Inovasi tercapai 2 inovasi sehingga persentase capaian sebesar 100% sementara untuk persentase realisasi anggaran sebesar 90,77%.

2. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan indikator Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja. Pada tahun 2024 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto

3. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Indikator dari program ini adalah persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi. Pada tahun 2024 realisasi capaian anggaran sebesar 94,30% dan realisasi capaian kinerja sebesar 52,83% dari target 30%. Program ini terdiri dari (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

4. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Indikator dari program penempatan tenaga kerja adalah persentase informasi lowongan kerja yang terpenuhi. Pada tahun 2024 realisasi capaian

keuangan sebesar 89,48%. Sementara untuk capaian kinerja sebesar 72,98% dari target sebesar 72%. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

5. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Indikator program hubungan dari program hubungan industrial adalah persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dan persentase tenaga kerja yang terdaftar jaminan sosial. Pada tahun 2024 realisasi capaian penyerapan anggaran sebesar 98,94%. Untuk realisasi kinerja dari indikator program yaitu persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan sebesar 85,71% dari target rencana kerja sebesar 80% dan persentase tenaga kerja yang terdaftar jaminan sosial sebesar 76,31% dari target sebesar 56%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

Selanjutnya pencapaian rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagaimana terdapat pada Tabel TC-29.

TABEL TC-29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KABUPATEN MOJOKERTO

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA KAB. MOJOKERTO

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2024)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N- 2/2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
	URUSAN WAJIB									
	KETENAGAKERJAAN									
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,40 (A)	83,01	83,50 (A)	81,30	97,37	81,45 (A)	245,76	2,88
		Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 inovasi	2	2 inovasi	2	100	2 inovasi	6	6,00
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	3	3,00
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	7	3,50
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	12 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	20	5,00
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	100%	90%	90,77%	100,00	90,80%	2,8157	3,13

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2024)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembiayaan Gaji dan TunjJumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bln	36 orang/bln	36 orang/bln	36 orang/bln	100	36 orang/bln	108	3,00
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan admnistrasi pelaksanaan tugas ASN	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	75%	75%	75%	86%	100	86,16%	2,4716	3,30
2.07.01.2.02.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	18 paket	7 paket	6 paket	85,71	6 paket	30	5,00
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	15 paket	7 paket	5 paket	71,43	7 paket	27	5,40
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 paket	39 paket	13 paket	13 paket	100	11 paket	63	4,85
2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	1 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	5	5,00
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	300 laporan	100 laporan	100 laporan	100	100 laporan	500	5,00
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2024)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100	24 laporan	72	6,00
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	60	5,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100	6 unit	18	3,00
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit	0 unit	1 unit	0	0 unit	2	2,00
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	30 unit	15 unit	18 unit	15 unit	83,33	18 unit	48	1,60
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100	0 dokumen	1	0,00
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	1	0,00
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	30%	28,83	30%	52,83%	176,1	30%	29,66	98,86

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2024)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	128 orang	117 orang	112 orang	117 orang	100	112 orang	346	2,70
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	128 orang	117 orang	112 orang	112 orang	100,00	48 orang	277	2,16
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	16 lembaga	16 lembaga	0 lembaga	0 lembaga	0	24 lembaga	40	2,50
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	30 lembaga	30 lembaga	15 lembaga	15 lembaga	100	0 lembaga	45	1,50
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	30 lembaga	30 lembaga	15 lembaga	15 lembaga	100,00	0 lembaga	45	1,50
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	4 perusahaan	4 perusahaan	0 perusahaan	0 perusahaan	100	0 perusahaan	4	1,00
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	4 perusahaan	12 perusahaan	0 perusahaan	0 perusahaan	0	0 perusahaan	12	3,00
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	75%	72,41	72%	72,98%	101,36	16%	73,3	97,73
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitasi Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.04.2.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	3 orang	3 orang	1 orang	1 orang	100,00	1 orang	5	1,67

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2024)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	20 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100,00	25 orang	85	4,25
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3,00
2.07.04.2.03.03	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	50 orang	135 orang	50 orang	50 orang	100,00	100 orang	285	5,70
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100	20 orang	60	3,00
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 orang	60 orang	20 orang	20 orang	100,00	35 orang	115	5,75
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitas, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	0 orang	30 orang	0 orang	0 orang	100	0 orang	30	0,00
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	0 orang	30 orang	0 orang	0 orang	0,00	0 orang	30	0,00
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	80%	80,95	80%	85,71%	107,14	86%	82,6671	103,33
		Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	56%	56,91	56%	76,31%	136,27	11,7%	57,79	103,20

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2024)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100,00%	100%	100,00%	100%	100	100,00%	3	3,00
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	4 perkara	12 perkara	4 perkara	4 perkara	100,00	20 perkara	36	9,00
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	10 perkara	20 perkara	10 perkara	10 perkara	100,00	0 perkara	30	3,00
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100,00	1 lembaga	3	3,00
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	200 orang	27900 orang	29024 orang	29024 orang	100,00	27930 orang	84854	424,27
	JUMLAH						116,89			

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bahwa kinerja pelayanan di Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Indikator Kinerja tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang telah dirumuskan terdiri dari 3 (Tiga) indikator kinerja utama, antara lain:

1. Persentase penempatan tenaga kerja;
2. Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial; dan
3. Nilai SAKIP perangkat daerah.

Target dan realisasi pencapaian dari 3 (tiga) indikator kinerja utama dan Indikator kinerja individu sebagaimana terdapat pada Tabel TC-30.

TABEL TC-30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	INDIKATOR	SPM STANDAR / OPERASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH (TAHUN)					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	5	5	6	9	7	11	9	11
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)												
1	PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA			86,50%	86,75%	87%	87,25%	87,50%					Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
2	PERSENTASE TINGKAT PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN			1,50%	1,45%	1,40%	1,35%	1,30%					Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
3	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH			81,45	81,50	81,55	81,60	81,65					Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PROGRAM												
1	PERSENTASE LULUSAN PESERTA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI			92%	92,50%	93%	93,5%	94%					Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
2	PERSENTASE PERUSAHAAN PENYEDIA INFORMASI LOWONGAN KERJA PADA TAHUN N			16%	16,5%	17%	17,5%	18%					Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
3	PERSENTASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN			86%	86,50%	87%	87,50%	88%					Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
4	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG TERDAFTAR JAMINAN SOSIAL			11,7%	35%	35,5%	36%	36,5%					Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
5	PERSENTASE PROG DAN KEGIATAN YANG MENGACU PERENCANAAN TENAGA KERJA			100%	100%	100%	100%	100%					Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1
6	PERSENTASE CALON TRANSMIGRAN YANG DITEMPATKAN			100%	100%	100%	100%	100%					Realisasi capaian berdasarkan kondisi akhir tahun N dan N+1

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bahwa isu-isu penting ketenagakerjaan yang mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan di Dinas Tenaga Kerja diantaranya sebagai berikut:

NO	ISU -ISU	KENDALA DAN TANTANGAN	REKOMENDASI
1	Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi permasalahan baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya penduduk usia angkatan kerja yang belum mempunyai keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia industri dan wirausaha, sehingga sulit bersaing di pasar bebas baik di level lokal/ daerah dan luar Daerah serta kekurangsiapan menghadapi era industri 4.0	Bahwa perlunya Pelatihan yang berbasis ketrampilan dan sertifikasi dalam berbagai sektor usaha terhadap pencari kerja yang dengan bentuk uji kompetensi agar pencari kerja/ tenaga kerja tersebut mampu bersaing di level lokal/ daerah dan luar daerah khususnya kesiapan dalam menghadapi era industri 4.0. Selain itu meningkatkan penyuluhan bursa kerja serta informasi kerja ke dalam bentuk bursa kerja serta mengadakan pembinaan serta perluasan kesempatan kerja dengan berkoordinasi dengan para perusahaan agar dapat membuka sektor pekerjaan baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara optimal
2	Lemahnya Perlindungan dan fasilitasi Kesejahteraan Tenaga Kerja di perusahaan	- Masih banyaknya perusahaan-perusahaan di wilayah kabupaten Mojokerto yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan yang baik dan benar termasuk penyediaan sarana dan prasarana keselamatan kerja K3 yang belum merata di perusahaan di wilayah Kabupaten Mojokerto; - Minimnya angka Tenaga Kerja yang diikut sertakan ke dalam Program Jaminan Sosial (Cth. BPJS) Ketenagakerjaan sebagai fasilitas wajib dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja;	- Bahwa perlu dimaksimalkan pembinaan maupun sosialisasi penerapan norma kerja, sosialisasi penerapan sarana dan prasarana keselamatan kerja (K3) di perusahaan dalam bentuk monitoring secara langsung dan berkala sebagai sarana hubungan industrial untuk menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis dan dinamis di wilayah Kabupaten Mojokerto; - Bahwa perlu dimaksimalkan pembinaan maupun sosialisasi agar perusahaan diwilayah Kabupaten Mojokerto mengikutsertakan seluruh pekerjaanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk preventif secara langsung untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk menciptakan ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja bagi pekerja di tempat kerjanya;
3	tingginya resiko Perselisihan Hubungan Industrial di wilayah Kabupaten Mojokerto	Tinginya angka Perselisihan Hubungan Industrial antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja;	Bahwa dengan banyaknya faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial yang terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai contoh isu yang paling banyak terjadi adalah tingginya angka Upah Minimum

NO	ISU -ISU	KENDALA DAN TANTANGAN	REKOMENDASI
			Kerja, sehingga banyak perusahaan yang mencoba untuk bertahan atau survive dengan cara mengurangi jumlah karyawan maka pemutusan hubungan kerja massal atau penutupan perusahaan sebagai cara yang terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak pengusaha agar dapat terus menjalankan perusahaannya tidak dapat terhindarkan lagi. Maka Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto dalam hal ini akan mengupayakan secara maksimal pendekatan secara sosialisasi maupun pembinaan hubungan industrial dalam bentuk klasikal atau ke perusahaan agar setiap perselisihan yang terjadi dapat terselesaikan di tingkat perusahaan secara bipartit
4	Lemahnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Lemahnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Perlunya pembinaan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap perlindungan dan fasilitasi tCalon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari proses dan tata cara pemberangkatan, selama bekerja dan setelah hubungan kerja berakhir (pemulangan)
5	Kurangnya Animo Masyarakat terhadap Fasilitasi Transmigrasi	Fasilitasi transmigrasi masih belum dijadikan solusi peningkatan kesejahteraan bagi masy. Mojokerto	1. terbatasnya kuota calon transmigran; 2. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan ke masyarakat terhadap fasilitasi transmigrasi

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Review Rancangan RKPD dengan membandingkan hasil analisis kebutuhan riil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, pelaksanaan pembahasan RKPD dengan analisis rencana kerja kebutuhan OPD masih disamakan, mengingat pada waktu penyusunan rencana kerja ini masih belum diterbitkan dokumen RKPD dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto. Reviu ini dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel TC-31.

TABEL TC-31
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
2.07	KETENAGAKERJAAN					KETENAGAKERJAAN					
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50 (A) NILAI	6.085.573.400	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50 (A) NILAI	5.587.434.000	
			Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi				Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi		
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target	100 %	47.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target	100 %	-	
2.07.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 Dokumen	3.750.000	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 Dokumen	-	
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD			1 Dokumen	3.750.000	Dokumen Rencana Kerja PAPBD			1 Dokumen	-	
2.07.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan			4 Dokumen	3.380.000	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan			4 Dokumen	-	
	Penyusunan Dokumen LKjIP			1 Dokumen	3.350.000	Penyusunan Dokumen LKjIP			1 Dokumen	-	
	Penyusunan Dokumen SAKIP			1 Dokumen	3.270.000	Penyusunan Dokumen SAKIP			1 Dokumen	-	
2.07.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	30.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Berita Acara	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Forum konsultasi publik tingkat OPD			1 Berita Acara	30.000.000	Forum konsultasi publik tingkat OPD			0 Berita Acara	-	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,81 %	5.171.855.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,81 %	5.171.822.600	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Org/ bln	5.167.822.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Org/ bln	5.167.822.600	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN			33 Org/ bln	2.487.305.000	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN			33 Org/ bln	2.487.305.000	
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)			33 Org/ bln	2.229.500.000	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)			33 Org/ bln	2.229.500.000	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN			33 Org/ bln	92.868.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN			33 Org/ bln	92.868.000	
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan			5527 Org/ bln (12 bln)	358.149.600	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan			5527 Org/ bln (12 bln)	358.149.600	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4.033.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	4.033.000	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	4.000.000	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	86,16 Nilai	26.617.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	86,16 Nilai	-	
2.07.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	26.617.800	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pakaian Dinas harian (Keky/Batik/Hitam Putih/Olahraga)			2 Paket	26.617.800	Pakaian Dinas harian (Keky/Batik/Hitam Putih/Olahraga)			0 Paket	-	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100 %	189.900.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100 %	132.181.400	
2.07.01.2.06.002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Paket	60.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Paket	54.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Belanja Modal peralatan, perlengkapan kebutuhan kantor			7 Paket	60.000.000	Belanja Modal peralatan, perlengkapan kebutuhan kantor			8 Paket	54.000.000	
2.07.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 Paket	14.400.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	8.600.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			8 Paket	14.400.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			6 Paket	8.600.000	
2.07.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	11 Paket	27.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	11 Paket	19.621.400	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Cetakan Kop Dinas Map/Amplop/Banner/Cetak Buku/Kartu Kendali/Lembar Disposisi/Iklan/Langgan Koran /Foto copy/Jilid Buku			11 Paket	27.000.000	Cetakan Kop Dinas Map/Amplop/Banner/Cetak Buku/Kartu Kendali/Lembar Disposisi/Iklan/Langgan Koran /Foto copy/Jilid Buku			11 Paket	19.621.400	
2.07.01.2.06.007	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	16.960.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	ATK/Kertas Cover/Bahan Komputer/Benda Pos			2 Paket	25.000.000	ATK/Kertas Cover/Bahan Komputer/Benda Pos			2 Paket	16.960.000	
2.07.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	63.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82 Laporan	33.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Belanja Perjalanan dinas dalam kota/ Biasa/Luar Provinsi			150 Laporan	63.500.000	Belanja Perjalanan dinas dalam kota/ Biasa/Luar Provinsi			82 Laporan	33.000.000	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100 %	238.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100 %	201.000.000	
2.07.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	75.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	75.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Belanja Tagihan telepon, Listrik, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			12 Laporan	75.000.000	Belanja Tagihan telepon, Listrik, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			12 Laporan	75.000.000	
2.07.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	163.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	126.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 Laporan	163.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 Laporan	126.000.000	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik	100 %	411.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik	100 %	82.430.000	
2.07.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	86.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	60.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	BBM dan pelumas/Suku Cadang/biaya pajak kendaraan			6 Unit	86.000.000	BBM dan pelumas/Suku Cadang/biaya pajak kendaraan			6 Unit	60.000.000	
2.07.01.2.09.009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	0 Unit	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Renovasi dan pemeliharaan Ruang dan Gedung kantor			1 Unit	300.000.000	Pembiayaan Renovasi dan pemeliharaan Ruang dan Gedung kantor			0 Unit	-	
2.07.01.2.09.010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	31 Unit	25.500.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	25 Unit	22.430.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pemeliharaan AC/CCTV/Personal Komputer/ Peralatan Personal Komputer/Pompa Air			31 Unit	25.500.000	Pemeliharaan AC/CCTV/Personal Komputer/ Peralatan Personal Komputer/Pompa Air			25 Unit	22.430.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.02	Program perencanaan tenaga kerja		Persentase Program Dan Kegiatan Yang Mengacu Perencanaan Tenaga Kerja	100 %	-	Program perencanaan tenaga kerja		Persentase Program Dan Kegiatan Yang Mengacu Perencanaan Tenaga Kerja	100 %	-	
2.07.02.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	0 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	0 Dokumen	-	
2.07.02.2.01.001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 Dokumen	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro			0 Dokumen	-	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro			0 Dokumen	-	
2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja		Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi	92,5 %	1.660.000.000	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja		Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi	92,5 %	494.000.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	111 Orang	1.560.000.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	48 Orang	490.000.000	
2.07.03.2.01.001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 Orang	1.140.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	48 Orang	450.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pelatihan Digital Marketing			16 Orang	400.000.000	Pelatihan Digital Marketing			0 Orang	-	
	Pelatihan Operator Alat Berat (Forklift)			16 Orang	440.000.000	Pelatihan Operator Alat Berat (Forklift)			16 Orang	150.000.000	
	DBHCHT					DBHCHT					
	Pelatihan dan sertifikasi pembuatan kue			16 Orang	150.000.000	Pelatihan dan sertifikasi pembuatan kue			16 Orang	150.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelatihan dan sertifikasi tata rias			16 Orang	150.000.000	Pelatihan dan sertifikasi tata rias			16 Orang	150.000.000	
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	16 Lembaga	90.000.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	16 Lembaga	40.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pemberdayaan dan Koordinasi kelembagaan vokasi			16 Lembaga	90.000.000	Pemberdayaan dan Koordinasi kelembagaan vokasi			16 Lembaga	40.000.000	
	Pelatihan metodologi instruktur lembaga pelatihan kerja			0 Lembaga	-	Pelatihan metodologi instruktur lembaga pelatihan kerja			0 Lembaga	-	
2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	47 Orang	330.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	0 Orang	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Fasilitasi Pendampingan dan pelaksanaan pelatihan vokasi peserta pemagangan			15 Orang	30.000.000	Fasilitasi Pendampingan dan pelaksanaan pelatihan vokasi peserta pemagangan			0 Orang	-	
	Pelatihan 1 Vokasi (berbasis pesantren)			16 Orang	150.000.000	Pelatihan 1 Vokasi (berbasis pesantren)			0 Orang	-	
	Pelatihan 2 Vokasi (berbasis pesantren)			16 Orang	150.000.000	Pelatihan 2 Vokasi (berbasis pesantren)			0 Orang	-	
2.07.03.2.01.0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas		Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	0 Lembaga	-	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas		Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	0 Lembaga	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.03.2.01.006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas		Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	0 Kesepakatan	-	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas		Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	0 Kesepakatan	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	30 Lembaga	50.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	15 Lembaga	4.000.000	
2.07.03.2.02.001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	50.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	4.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			15 Orang	25.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			15 Orang	4.000.000	
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri			15 Orang	25.000.000	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri			0 Orang	-	
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	4 Perusahaan	50.000.000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	0 Perusahaan	-	
2.07.03.2.04.001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	4 Perusahaan	50.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	0 Perusahaan	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi konsultasi produktivitas			4 Perusahaan	50.000.000	Fasilitasi konsultasi produktivitas			0 Perusahaan	-	
2.07.04	Program penempatan tenaga kerja		Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun n	16,5 %	375.000.000	Program penempatan tenaga kerja		Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun n	16,5 %	104.000.000	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitasi Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100 %	140.000.000	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitasi Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100 %	13.000.000	
2.07.04.2.01.002	Pelayanan antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	0 Orang	-	Pelayanan antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	0 Orang	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
2.07.04.2.01.005	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	110 Orang	140.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	13.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			50 Orang	40.000.000	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			20 Orang	13.000.000	
	Pembinaan tenaga pendamping TKA			60 Orang	100.000.000	Pembinaan tenaga pendamping TKA			0 Orang	-	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Fasilitasi pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100 %	200.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Fasilitasi pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100 %	71.000.000	
2.07.04.2.03.003	Job Fair/ Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	200.000.000	Job Fair/ Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	71.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Job Fair			20 Stand	200.000.000	Job Fair			20 Stand	60.000.000	
	Bimbingan Karier			0 Orang	-	Bimbingan Karier			60 Orang	11.000.000	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	50 Orang	35.000.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	25 Orang	20.000.000	
2.07.04.2.04.001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	35.000.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	25 Orang	20.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)			50 Orang	35.000.000	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)			25 Orang	20.000.000	
2.07.04.3.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi penerbitan perpanjangan IMTA yang tercapai sesuai target	100 %	-	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi penerbitan perpanjangan IMTA yang tercapai sesuai target	100 %	-	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.04.3.05.002	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota		Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/ kota Yang Divalidasi	0 SKRD	-	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota		Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/ kota Yang Divalidasi	0 SKRD	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
2.07.05	Program hubungan industrial		Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	86,5 % 0	3.646.192.000	Program hubungan industrial		Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	86,5 % 0	3.234.917.000	
			Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	35 %				Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	35 %		
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase fasilitasi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang tercapai sesuai target	100 %	90.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase fasilitasi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang tercapai sesuai target	100 %	45.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.05.2.01.001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	45.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	45.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perusahaan			50 Orang	45.000.000	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perusahaan			50 Orang	45.000.000	
2.07.05.2.01.002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 Perusahaan	45.000.000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	0 Perusahaan	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Bimbingan Teknis Tata Cara Perundingan dan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama			25 Perusahaan	45.000.000	Bimbingan Teknis Tata Cara Perundingan dan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama			0 Perusahaan	-	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100 %	3.556.192.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100 %	3.189.917.000	
2.07.05.2.02.001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	345.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	180.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan			3 Rapat	200.000.000	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan			3 Rapat	130.000.000	
	Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur dan Skala Upah			50 Perusahaan	50.000.000	Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur dan Skala Upah			0 Perusahaan	-	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial			50 Orang	50.000.000	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial			50 Orang	50.000.000	
	Pembinaan Syarat Kerja dan Sistem Outsourcing			50 Perusahaan	45.000.000	Pembinaan Syarat Kerja dan Sistem Outsourcing			0 Perusahaan	-	
2.07.05.2.02.002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	20 Perkara	40.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	0 Perkara	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			20 Perkara	40.000.000	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			0 Perkara	-	
2.07.05.2.02.004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	75.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	33.725.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit			4 Rapat	75.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit			2 Rapat	33.725.000	
2.07.05.2.02.005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	27940 Orang	3.096.192.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	27845 Orang	2.976.192.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembinaan untuk peningkatan Perlindungan Keselamatan, kesehatan kerja (K3)			50 Orang	50.000.000	Pembinaan untuk peningkatan Perlindungan Keselamatan, kesehatan kerja (K3)			30 Orang	25.000.000	
	Pembinaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Perusahaan			50 Orang	75.000.000	Pembinaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Perusahaan			30 Orang	50.000.000	
	Pembinaan sarana dan prasarana di Perusahaan			50 Orang	50.000.000	Pembinaan sarana dan prasarana di Perusahaan			0 Orang		
	Pembinaan Penggunaan Pekerja Perempuan dan Anak di perusahaan			50 Orang	50.000.000	Pembinaan Penggunaan Pekerja Perempuan dan Anak di perusahaan			45 Orang	30.000.000	
	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Petani Tembakau dan Pekerja Rentan Lainnya			27740 Orang	2.871.192.000	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Petani Tembakau dan Pekerja Rentan Lainnya			27740 Orang	2.871.192.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
3.32.03	Program pembangunan kawasan transmigrasi		Persentase calon transmigran yang ditempatkan	100 %	145.000.000	Program pembangunan kawasan transmigrasi		Persentase calon transmigran yang ditempatkan	100 %	65.000.000	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kegiatan fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai target	100 %	145.000.000	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kegiatan fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai target	100 %	65.000.000	
3.32.03.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	22.500.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Fasilitasi koordinasi Daerah penerima trans			1 Laporan	50.000.000	Fasilitasi koordinasi Daerah penerima trans			1 Laporan	22.500.000	
3.32.03.2.01.004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	1 Kepala Keluarga	30.000.000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	1 Kepala Keluarga	17.500.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Fasilitasi penempatan Calon Transmigran Kabupaten Mojokerto			1 Kepala Keluarga	30.000.000	Fasilitasi penempatan Calon Transmigran Kabupaten Mojokerto			1 Kepala Keluarga	17.500.000	
3.32.03.2.01.005	Penyuluhan Transmigrasi		Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	30 Kepala Keluarga	15.000.000	Penyuluhan Transmigrasi		Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	15 Kepala Keluarga	5.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Fasilitasi penyuluhan Calon Transmigran Kabupaten Mojokerto			30 Kepala Keluarga	15.000.000	Fasilitasi penyuluhan Calon Transmigran Kabupaten Mojokerto			15 Kepala Keluarga	5.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.32.03.2.01.0019	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)		Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran	1 Paket	15.000.000	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)		Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran	2 Paket	20.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Fasilitasi bantuan bagi Calon Transmigran Kab. Mojokerto			1 Paket	15.000.000	Fasilitasi bantuan bagi Calon Transmigran Kab. Mojokerto			2 Paket	20.000.000	
3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi		Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	35.000.000	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi		Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	0 Lokasi	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Monitoring dan evaluasi transmigran Kabupaten Mojokerto di lokasi penempatan trans			1 Lokasi	35.000.000	Monitoring dan evaluasi transmigran Kabupaten Mojokerto di lokasi penempatan trans			0 Lokasi	-	
	JUMLAH				11.911.765.400	JUMLAH				9.485.351.000	

2.5 PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Bahwa kajian dalam penelaan usulan program dan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja berpedoman kepada Program-program Nasional dan prioritas kebutuhan masyarakat wilayah Kabupaten Mojokerto, dimana dapat dilihat pada Tabel TC-32

TABEL TC-32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2026 KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, maka diperoleh hasil telaah sebagai berikut:

TABEL RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025-2029			
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya masyarakat jawa timur yang adil, sejahtera unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong	Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan	Meningkatkan pedayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja serta sebagai upaya menurunkan pengangguran	Meningkatnya kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja
			Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
			Meningkatnya efektivitas pembinaan dan mediasi hubungan industrial;
			Meningkatnya efektifitas pengawasan di bidang norma ketenagakerjaan;
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dalam mensinkronisasikan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, perlu terlebih dahulu memetakan visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah Terpilih 2025-2029, yaitu antara lain :

TABEL VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029			
VISI	MISI KE 3	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil dan makmur	Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi	Menurunnya Angka Pengangguran

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka untuk mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2025-2029, Dinas Tenaga Kerja Melaksanakan Misi Ke 3 dan sebagai pedoman sinkronisasi maka berikut ini adalah tabel pemetaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah:

TABEL PEMETAAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Menurunnya Angka Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja
	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif	Persentase tingkat perselelisihan hubungan industrial
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Untuk mengetahui keselarasan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan visi, misi kepala daerah terpilih periode 2025-2029, berikut ini kami lampirkan tabel matriks tujuan dan sasaran perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, yaitu :

TABEL MATRIKS
KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH DAERAH					PERANGKAT DAERAH		
VISI	MISI 3	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil Dan Makmur							
	Membangun kemandirian ekonomi bagi industri pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat						
		Menurunkan kemiskinan dan pemerataan pendapatan		. Indeks Gini			
			Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Menurunnya angka pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
						Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja
						Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Kondusif	Persentase Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial Di Perusahaan
						Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Berikut ini ditampilkan Tabel 3.2.2 sebagai pedoman capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan indikator capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.

TABEL 3.2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Penurunan Angka Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)							
		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81,45 (A)	81,45 (A)	81,50 (A)	81,75 (A)	82,00 (A)	82,25 (A)	82,50 (A)
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	86,21%	86,50%	87,75%	87,00%	87,25%	87,50%	88,00%
		Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Kondusif	Persentase Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial Di Perusahaan	3%	1,50%	1,45%	1,40%	1,35%	1,30%	1,25%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan tupoksinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketenagakerjaan. Dimana pada tahun 2026 mendatang diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang Ketenagakerjaan.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto pada tahun 2026, sesuai rencana strategis dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih mengusung tema permasalahan penurunan angka pengangguran yang berkorelasi dengan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) maka dari itu adapun program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dalam penanganan penekanan tingkat pengangguran terbuka harus tepat sasaran agar pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto berhasil pada 5 (lima) tahun ke depan ini, Program, Kegiatan dan sub kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel TC – 33.

TABEL TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2.07	KETENAGAKERJAAN								
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81,50 (A) NILAI	5.587.434.000			81,50 (A) NILAI	5.949.181.582
		Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan		1 Inovasi				1 Inovasi	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target		100 %	-			100 %	-
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	-			2 Dokumen	-
	RINCIAN :								
	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 Dokumen	-			1 Dokumen	-
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD			1 Dokumen	-			1 Dokumen	-
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan	-			6 Laporan	-
	RINCIAN :								
	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan			4 Dokumen	-			4 Dokumen	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Dokumen LKjIP			1 Dokumen	-			1 Dokumen	-
	Penyusunan Dokumen SAKIP			1 Dokumen	-			1 Dokumen	-
2.07.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Berita Acara	-			0 Berita Acara	-
	RINCIAN :								
	Forum konsultasi publik tingkat OPD			0 Berita Acara	-			0 Berita Acara	-
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90,81 %	5.171.822.600			90,81 %	5.533.570.182
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 Org/ bln	5.167.822.600			33 Org/ bln	5.529.570.182
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN			33 Org/ bln	2.487.305.000			33 Org/ bln	2.661.416.350
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)			33 Org/ bln	2.229.500.000			33 Org/ bln	2.385.565.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN			33 Org/ bln	92.868.000			33 Org/ bln	99.368.760
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan			5527 Org/ bln (12 bln)	358.149.600			5527 Org/ bln (12 bln)	383.220.072
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	4.000.000			1 Dokumen	4.000.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	4.000.000			1 Dokumen	4.000.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja		86,16 Nilai	-			86,16 Nilai	-
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 Paket	-			0 Paket	-
	RINCIAN :								
	Pakaian Dinas harian (Keky/Batik/Hitam Putih/Olahraga)			0 Paket	-			0 Paket	-
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100 %	132.181.400			100 %	132.181.400
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan		8 Paket	54.000.000			8 Paket	54.000.000
	RINCIAN :								
	Belanja Modal peralatan, perlengkapan kebutuhan kantor			8 Paket	54.000.000			8 Paket	54.000.000
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan		6 Paket	8.600.000			6 Paket	8.600.000
	RINCIAN :								
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			6 Paket	8.600.000			6 Paket	8.600.000
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan		11 Paket	19.621.400			11 Paket	19.621.400
	RINCIAN :								
	Cetakan Kop Dinas Map/Amplop/Banner/Cetak Buku/Kartu Kendali/Lembar Disposisi/Iklan/Langganan Koran /Foto copy/Jilid Buku			11 Paket	19.621.400			11 Paket	19.621.400
2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		2 Paket	16.960.000			2 Paket	16.960.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RINCIAN :								
	ATK/Kertas Cover/Bahan Komputer/Benda Pos			2 Paket	16.960.000			2 Paket	16.960.000
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		82 Laporan	33.000.000			82 Laporan	33.000.000
	RINCIAN :								
	Belanja Perjalanan dinas dalam kota/ Biasa/Luar Provinsi			82 Laporan	33.000.000			82 Laporan	33.000.000
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		100 %	201.000.000			100 %	201.000.000
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Laporan	75.000.000			12 Laporan	75.000.000
	RINCIAN :								
	Belanja Tagihan telepon, Listrik, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			12 Laporan	75.000.000			12 Laporan	75.000.000
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 Laporan	126.000.000			12 Laporan	126.000.000
	RINCIAN :								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 Laporan	126.000.000			12 Laporan	126.000.000
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemeruintah Daerah	Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik		100 %	82.430.000			100 %	82.430.000
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit	60.000.000			6 Unit	60.000.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RINCIAN :								
	BBM dan pelumas/Suku Cadang/biaya pajak kendaraan			6 Unit	60.000.000			6 Unit	60.000.000
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		0 Unit	-			0 Unit	-
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Renovasi dan pemeliharaan Ruang dan Gedung kantor			0 Unit	-			0 Unit	-
2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		25 Unit	22.430.000			25 Unit	22.430.000
	RINCIAN :								
	Pemeliharaan AC/CCTV/Personal Komputer/ Peralatan Personal Komputer/Pompa Air			25 Unit	22.430.000			25 Unit	22.430.000
2.07.02	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase Program Dan Kegiatan Yang Mengacu Perencanaan Tenaga Kerja		100 %	-			100 %	-
2.07.02.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun		0 Dokumen	-			0 Dokumen	-
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		0 Dokumen	-			0 Dokumen	-
	RINCIAN :								
	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro			0 Dokumen	-			0 Dokumen	-
2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi		92,5 %	494.000.000			92,5 %	494.000.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi		48 Orang	490.000.000			48 Orang	490.000.000
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		48 Orang	450.000.000			48 Orang	450.000.000
	RINCIAN :								
	Pelatihan Digital Marketing			0 Orang	-			0 Orang	-
	Pelatihan Operator Alat Berat (Forklift)			16 Orang	150.000.000			16 Orang	150.000.000
	DBHCHT								
	Pelatihan dan sertifikasi pembuatan kue			16 Orang	150.000.000			16 Orang	150.000.000
	Pelatihan dan sertifikasi tata rias			16 Orang	150.000.000			16 Orang	150.000.000
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		16 Lembaga	40.000.000			16 Lembaga	40.000.000
	RINCIAN :								
	Pemberdayaan dan Koordinasi kelembagaan vokasi			16 Lembaga	40.000.000			16 Lembaga	40.000.000
	Pelatihan metodologi instruktur lembaga pelatihan kerja			0 Lembaga	-			0 Lembaga	-
2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		0 Orang	-			0 Orang	-
	RINCIAN :								

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Pendampingan dan pelaksanaan pelatihan vokasi peserta pemagangan			0 Orang	-			0 Orang	-
	Pelatihan 1 Vokasi (berbasis pesantren)			0 Orang	-			0 Orang	-
	Pelatihan 2 Vokasi (berbasis pesantren)			0 Orang	-			0 Orang	-
2.07.03.2.01.0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas		0 Lembaga	-			0 Lembaga	-
	RINCIAN :								
2.07.03.2.01.0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n		0 Kesepakatan	-			0 Kesepakatan	-
	RINCIAN :								
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina		15 Lembaga	4.000.000			15 Lembaga	4.000.000
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		15 Lembaga	4.000.000			15 Lembaga	4.000.000
	RINCIAN :								

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			15 Orang	4.000.000			15 Orang	4.000.000
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri			0 Orang	-			0 Orang	-
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas		0 Perusahaan	-			0 Perusahaan	-
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas		0 Perusahaan	-			0 Perusahaan	-
	RINCIAN :								
	Fasilitasi konsultasi produktivitas			0 Perusahaan	-			0 Perusahaan	-
2.07.04	Program penempatan tenaga kerja	Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun n		16,5 %	104.000.000			16,5 %	104.000.000
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target		100 %	13.000.000			100 %	13.000.000
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		0 Orang	-			0 Orang	-
	RINCIAN :								
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		20 Orang	13.000.000			20 Orang	13.000.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RINCIAN :								
	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			20 Orang	13.000.000			20 Orang	13.000.000
	Pembinaan tenaga pendamping TKA			0 Orang	-			0 Orang	-
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target		100 %	71.000.000			100 %	71.000.000
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		100 Orang	71.000.000			100 Orang	71.000.000
	RINCIAN :								
	Job Fair			20 Stand	60.000.000			20 Stand	60.000.000
	Bimbingan Karier			60 Orang	11.000.000			60 Orang	11.000.000
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI		25 Orang	20.000.000			25 Orang	20.000.000
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		25 Orang	20.000.000			25 Orang	20.000.000
	RINCIAN :								
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)			25 Orang	20.000.000			25 Orang	20.000.000
2.07.04.3.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas penerbitan perpanjangan IMTA yang tercapai sesuai target		100 %	-			100 %	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.04.3.05.0002	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/ kota Yang Divalidasi		0 SKRD	-			0 SKRD	-
	RINCIAN :								
2.07.05	Program hubungan industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan		86,50 %	3.234.917.000			86,50 %	3.234.917.000
		Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial		35 %				35 %	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitasi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang tercapai sesuai target		100 %	45.000.000			100 %	45.000.000
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		50 Perusahaan	45.000.000			50 Perusahaan	45.000.000
	RINCIAN :								

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perusahaan			50 Orang	45.000.000			50 Orang	45.000.000
2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		25 Perusahaan	-			25 Perusahaan	-
	RINCIAN :								
	Bimbingan Teknis Tata Cara Perundingan dan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama			25 Perusahaan	-			25 Perusahaan	-
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target		100 %	3.189.917.000			100 %	3.189.917.000
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		10 Perkara	180.000.000			10 Perkara	180.000.000
	RINCIAN :								
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan			3 Rapat	130.000.000			3 Rapat	130.000.000
	Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur dan Skala Upah			50 Perusahaan	-			50 Perusahaan	-
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial			50 Orang	50.000.000			50 Orang	50.000.000
	Pembinaan Syarat Kerja dan Sistem Outsourcing			50 Perusahaan	-			50 Perusahaan	-
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		0 Perkara	-			0 Perkara	-
	RINCIAN :								

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			0 Perkara	-			0 Perkara	-
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1 Lembaga	33.725.000			1 Lembaga	33.725.000
	RINCIAN :								
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit			2 Rapat	33.725.000			2 Rapat	33.725.000
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		27845 Orang	2.976.192.000			27845 Orang	2.976.192.000
	RINCIAN :								
	Pembinaan untuk peningkatan Perlindungan Keselamatan, kesehatan kerja (K3)			30 Orang	25.000.000			30 Orang	25.000.000
	Pembinaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Perusahaan			30 Orang	50.000.000			30 Orang	50.000.000
	Pembinaan sarana dan prasarana di Perusahaan			0 Orang				0 Orang	
	Pembinaan Penggunaan Pekerja Perempuan dan Anak di perusahaan			45 Orang	30.000.000			45 Orang	30.000.000
	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Petani Tembakau dan Pekerja Rentan Lainnya			27740 Orang	2.871.192.000			27740 Orang	2.871.192.000
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.32.03	Program pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase calon transmigran yang ditempatkan		100 %	65.000.000			100 %	65.000.000
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai target		100 %	65.000.000			100 %	65.000.000
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	22.500.000			1 Laporan	22.500.000
	RINCIAN :								
	Fasilitasi koordinasi Daerah penerima trans			1 Laporan	22.500.000			1 Laporan	22.500.000
3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		1 Kepala Keluarga	17.500.000			1 Kepala Keluarga	17.500.000
	RINCIAN :								
	Fasilitasi penempatan Calon Transmigran Kabupaten Mojokerto			1 Kepala Keluarga	17.500.000			1 Kepala Keluarga	17.500.000
3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan		15 Kepala Keluarga	5.000.000			15 Kepala Keluarga	5.000.000
	RINCIAN :								
	Fasilitasi penyuluhan Calon Transmigran Kabupaten Mojokerto			15 Kepala Keluarga	5.000.000			15 Kepala Keluarga	5.000.000
3.32.03.2.01.0019	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran		2 Paket	20.000.000			2 Paket	20.000.000
	RINCIAN :								
	Fasilitasi bantuan bagi Calon Transmigran Kab. Mojokerto			2 Paket	20.000.000			2 Paket	20.000.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi		0 Lokasi	-			0 Lokasi	-
	RINCIAN :								
	Monitoring dan evaluasi transmigran Kabupaten Mojokerto di lokasi penempatan trans			0 Lokasi	-			0 Lokasi	-
	JUMLAH				9.485.351.000				9.847.098.582

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bahwa rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan rekapitulasi rancangan tahun 2026 yang memuat usulan program dan kegiatan kemudian disinkronisasikan melalui RKPD dengan pagu indikatif yang meliputi anggaran berbasis APBD dan APBD Provinsi serta sumber dana yang berbasis dana transfer umum dan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1
MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR												
2.07	KETENAGAKERJAAN												
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50 (A) NILAI		5.587.434.000					
					Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi							
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target		100 %		-					
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen		-					
	RINCIAN :												
	Dokumen Rencana Kerja APBD					1 Dokumen		-					
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD					1 Dokumen		-					
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan		-					
	RINCIAN :												
	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan					4 Dokumen		-					
	Penyusunan Dokumen LKjIP					1 Dokumen		-					
	Penyusunan Dokumen SAKIP					1 Dokumen		-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		-					
	RINCIAN :												
	Forum konsultasi publik tingkat OPD					0 Berita Acara		-					
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90,81 %		5.171.822.600					
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 Org/ bln		5.167.822.600					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN					33 Org/ bln		2.487.305.000					
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)					33 Org/ bln		2.229.500.000					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN					33 Org/ bln		92.868.000					
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan					5527 Org/ bln (12 bln)		358.149.600					
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen		4.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 Dokumen		4.000.000					
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja		86,16 Nilai		-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 Paket		-					
	RINCIAN :												
	Pakaian Dinas harian (Keky/Batik/Hitam Putih/Olahraga)					0 Paket		-					
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100 %		132.181.400					
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan		8 Paket		54.000.000					
	RINCIAN :												
	Belanja Modal peralatan, perlengkapan kebutuhan kantor					8 Paket		54.000.000					
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan		6 Paket		8.600.000					
	RINCIAN :												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6 Paket		8.600.000					
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan		11 Paket		19.621.400					
	RINCIAN :												
	Cetakan Kop Dinas Map/ Amplop / Banner/ Cetak Buku/ Kartu Kendali/ Lembar Disposisi/ Iklan/ Langganan Koran / Foto copy/ Jilid Buku					11 Paket		19.621.400					
2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		2 Paket		16.960.000					
	RINCIAN :												
	ATK/Kertas Cover/Bahan Komputer/Benda Pos					2 Paket		16.960.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		82 Laporan		33.000.000					
	RINCIAN :												
	Belanja Perjalanan dinas dalam kota/ Biasa/Luar Provinsi					82 Laporan		33.000.000					
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		100 %		201.000.000					
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Laporan		75.000.000					
	RINCIAN :												
	Belanja Tagihan telepon, Listrik, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					12 Laporan		75.000.000					
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 Laporan		126.000.000					
	RINCIAN :												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan		126.000.000					
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemeruintah Daerah			Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik		100 %		82.430.000					
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit		60.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RINCIAN :												
	BBM dan pelumas/Suku Cadang/biaya pajak kendaraan					6 Unit		60.000.000					
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		0 Unit		-					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Renovasi dan pemeliharaan Ruang dan Gedung kantor					0 Unit		-					
2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		25 Unit		22.430.000					
	RINCIAN :												
	Pemeliharaan AC/CCTV/Personal Komputer/ Peralatan Personal Komputer/Pompa Air					25 Unit		22.430.000					
2.07.02	Program perencanaan tenaga kerja				Persentase Program Dan Kegiatan Yang Mengacu Perencanaan Tenaga Kerja	100 %		-					
2.07.02.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun		0 Dokumen		-					
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		0 Dokumen		-					
	RINCIAN :												
	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro					0 Dokumen		-					
2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja				Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi	92,5 %		494.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi		48 Orang		490.000.000					
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		48 Orang		450.000.000					
	RINCIAN :												
	Pelatihan Digital Marketing					0 Orang		-					
	Pelatihan Operator Alat Berat (Forklift)					16 Orang		150.000.000					
	DBHCHT												
	Pelatihan dan sertifikasi pembuatan kue					16 Orang		150.000.000					
	Pelatihan dan sertifikasi tata rias					16 Orang		150.000.000					
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		16 Lembaga		40.000.000					
	RINCIAN :												
	Pemberdayaan dan Koordinasi kelembagaan vokasi					16 Lembaga		40.000.000					
	Pelatihan metodologi instruktur lembaga pelatihan kerja					0 Lembaga		-					
2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		0 Orang		-					
	RINCIAN :												
	Fasilitasi Pendampingan dan pelaksanaan pelatihan vokasi peserta pemagangan					0 Orang		-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pelatihan 1 Vokasi (berbasis pesantren)					0 Orang		-					
	Pelatihan 2 Vokasi (berbasis pesantren)					0 Orang		-					
2.07.03.2.01.0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas			Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas		0 Lembaga		-					
	RINCIAN :												
2.07.03.2.01.0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas			Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun		0 Kesepakatan		-					
	RINCIAN :												
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina		15 Lembaga		4.000.000					
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		15 Lembaga		4.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					15 Orang		4.000.000					
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri					0 Orang		-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas		0 Perusahaan		-					
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas		0 Perusahaan		-					
	RINCIAN :												
	Fasilitasi konsultasi produktivitas					0 Perusahaan		-					
2.07.04	Program penempatan tenaga kerja				Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun	16,5 %		104.000.000					
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Fasilitasi Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target		100 %		13.000.000					
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		0 Orang		-					
	RINCIAN :												
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		20 Orang		13.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)					20 Orang		13.000.000					
	Pembinaan tenaga pendamping TKA					0 Orang		-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target		100 %		71.000.000					
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/ Bursa Kerja			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		100 Orang		71.000.000					
	RINCIAN :												
	Job Fair					20 Stand		60.000.000					
	Bimbingan Karier					60 Orang		11.000.000					
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI		25 Orang		20.000.000					
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		25 Orang		20.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)					25 Orang		20.000.000					
2.07.04.3.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Persentase fasilitas penerbitan perpanjangan IMTA yang tercapai sesuai target		100 %		-					
2.07.04.3.05.0002	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota			Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/ kota Yang Divalidasi		0 SKRD		-					
	RINCIAN :												

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.05	Program hubungan industrial				Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	86,50 %		3.234.917.000					
					Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	35 %							
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			Persentase fasilitasi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang tercapai sesuai target		100 %		45.000.000					
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		50 Perusahaan		45.000.000					
	RINCIAN :												
	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perusahaan					50 Orang		45.000.000					
2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		25 Perusahaan		-					
	RINCIAN :												
	Bimbingan Teknis Tata Cara Perundingan dan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama					25 Perusahaan		-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota			Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target		100 %		3.189.917.000					
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah Perselisihan yang Dicegah		10 Perkara		180.000.000					
	RINCIAN :												
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan					3 Rapat		130.000.000					
	Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur dan Skala Upah					50 Perusahaan		-					
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial					50 Orang		50.000.000					
	Pembinaan Syarat Kerja dan Sistem Outsourcing					50 Perusahaan		-					
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		0 Perkara		-					
	RINCIAN :												
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial					0 Perkara		-					
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1 Lembaga		33.725.000					
	RINCIAN :												
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit					2 Rapat		33.725.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		27845 Orang		2.976.192.000					
	RINCIAN :												
	Pembinaan untuk peningkatan Perlindungan Keselamatan, kesehatan kerja (K3)					30 Orang		25.000.000					
	Pembinaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Perusahaan					30 Orang		50.000.000					
	Pembinaan sarana dan prasarana di Perusahaan					0 Orang							
	Pembinaan Penggunaan Pekerja Perempuan dan Anak di perusahaan					45 Orang		30.000.000					
	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Petani Tembakau dan Pekerja Rentan Lainnya					27740 Orang		2.871.192.000					
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI												
3.32.03	Program pembangunan kawasan transmigrasi				Persentase calon transmigran yang ditempatkan	100 %		65.000.000					
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Persentase kegiatan fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai target		100 %		65.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/ TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan		22.500.000					
	RINCIAN :												
	Fasilitasi koordinasi Daerah penerima trans					1 Laporan		22.500.000					
3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		1 Kepala Keluarga		17.500.000					
	RINCIAN :												
	Fasilitasi penempatan Calon Transmigran Kabupaten Mojokerto					1 Kepala Keluarga		17.500.000					
3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan		15 Kepala Keluarga		5.000.000					
	RINCIAN :												
	Fasilitasi penyuluhan Calon Transmigran Kabupaten Mojokerto					15 Kepala Keluarga		5.000.000					
3.32.03.2.01.0019	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)			Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran		2 Paket		20.000.000					
	RINCIAN :												
	Fasilitasi bantuan bagi Calon Transmigran Kab. Mojokerto					2 Paket		20.000.000					
3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi		0 Lokasi		-					
	RINCIAN :												
	Monitoring dan evaluasi transmigran Kabupaten Mojokerto di lokasi penempatan trans					0 Lokasi		-					
JUMLAH								9.485.351.000					

BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting

Rencana kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 yang telah disusun ini, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan rencana kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2026 yang akan datang.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen rancangan rencana kerja Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, [RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029](#), dan Rencana Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 2025-2029.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2026 telah disesuaikan dengan kondisi Renstra 2025-2029, karena Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan.

Mojokerto, 11 Agustus 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI, SH., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680207 198809 1 001